

*Pusat Kajian Anggaran | Badan Keahlian | Sekretariat Jenderal DPR RI*

# **BUDGET ISSUE BRIEF**

## **Ekonomi & Keuangan**

*Vol 02, Ed 11, Juni 2022*

**TINJAUAN ATAS PAGU INDIKATIF TAHUN  
2023 KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS**

**Hal. 1**

**MENILIK ASUMSI *LIFTING* MINYAK DAN GAS  
BUMI TAHUN 2023**

**Hal. 3**



9 772775 798000

## Daftar Isi

Artikel 1 Tinjauan atas Pagu Indikatif Tahun 2023 Kementerian PPN/Bappenas .....	1
Artikel 2 Menilik Asumsi <i>Lifting</i> Minyak dan Gas Bumi Tahun 2023 .....	3

## Dewan Redaksi

### Pengarah

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

### Penanggung Jawab

Drs. Helmizar, M.E.

### Pemimpin Redaksi

Dwi Resti Pratiwi, S.T., MPM

### Redaktur

Robby Alexander Sirait, S.E., M.E.

Damia Liana, S.E.

Nadya Ahda, S.E

### Editor

Ervita Luluk Zahara S.E.

### Sekretariat

Husnul Latifah, S.Sos.

Musbiyatun

Kiki Zakiah, S.E., M.AP, CRP

Hilda Piska Randini, S.I.P.

*Budget Issue Brief* Ekonomi dan Keuangan ini diterbitkan oleh Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian DPR RI. Isi dan hasil penelitian dalam tulisan-tulisan di terbitan ini sepenuhnya tanggung jawab para penulis dan bukan merupakan pandangan resmi Badan Keahlian DPR RI.

## Komisi XI

## EKONOMI DAN KEUANGAN

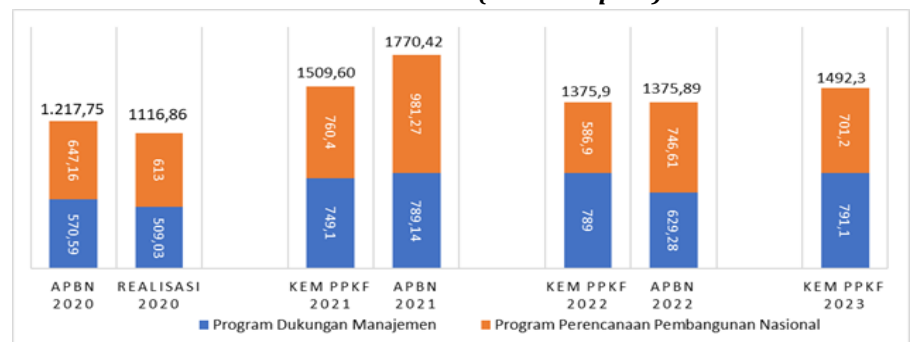
## TINJAUAN ATAS PAGU INDIKATIF TAHUN 2023 KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

### HIGHLIGHT

- Dalam Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun 2023, Bappenas kembali mengajukan penambahan anggaran sebesar Rp400 miliar, sehingga total pagu indikatif tahun 2023 Bappenas menjadi Rp1.892,3 miliar, dengan rincian program perencanaan pembangunan nasional sebesar Rp1.144,2 miliar dan program dukungan manajemen sebesar Rp731,1 miliar
- Atas usulan tersebut, Komisi XI menyetujui pagu indikatif yang diajukan, dengan catatan Kementerian PPN memastikan beberapa hal berikut, di antaranya arah kebijakan program pemerintah pusat pada tahun 2023 di setiap K/L sejalan dengan reformasi struktural, setiap K/L menyajikan data dan informasi reformasi struktural dan reformasi *spending better* yang akan dijalankan tahun 2023, pada RKA K/L RAPBN TA 2023 dengan menunjukkan perbaikan dan perubahannya, dan menjamin tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi program pemerintah pusat dan daerah.
- Diharapkan Komisi XI DPR RI dapat mendorong Menteri Keuangan dan Menteri PPN untuk berkoordinasi penyusunan kajian dalam rangka mengidentifikasi kegiatan di BUN yang dapat diintegrasikan dalam RKP, menyempurnakan struktur *database* dalam sistem informasi perencanaan dan menyusun aturan terkait penandaan DAK yang lebih komprehensif, dan mengintegrasikan seluruh data terkait alokasi anggaran untuk mencapai sasaran pembangunan nasional dalam sistem informasi perencanaan.

Pada periode 2020-2022, anggaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) cenderung mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020, realisasi anggaran Bappenas ialah Rp1.116,86 miliar, kemudian pada anggaran 2021 meningkat sebesar 58 persen menjadi Rp1.770,4 miliar. Bila dibandingkan pagu indikatifnya, anggaran di tahun 2021 ini juga mengalami peningkatan yang cukup tinggi, yaitu sebesar 17 persen. Selanjutnya, alokasi anggaran Bappenas TA 2022 mengalami penurunan sebesar 22 persen menjadi Rp1.375,89 miliar dari anggaran 2021. Pada pagu indikatif 2023 ini kembali mengalami peningkatan sebesar 8,4 persen menjadi Rp1.492,3 miliar dibandingkan tahun 2022 (Gambar 1).

**Gambar 1. Anggaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020-2023 (Miliar Rupiah)**



Sumber: KEM PPKF dan Nota Keuangan

Dalam Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun 2023, Bappenas kembali mengajukan penambahan anggaran sebesar Rp400 miliar, sehingga total pagu indikatif tahun 2023 Bappenas menjadi Rp1.892,3 miliar dengan rincian program perencanaan pembangunan nasional sebesar Rp1.144,2 miliar dan program dukungan manajemen sebesar Rp731,1 miliar. Atas usulan tersebut, Komisi XI menyetujui pagu indikatif yang diajukan dengan catatan Kementerian PPN memastikan beberapa hal berikut, yaitu: (1) penambahan usulan anggaran diarahkan untuk mempercepat capaian RPJMN; (2) arah kebijakan program pemerintah pusat pada tahun 2023 di setiap kementerian/lembaga (K/L) sejalan dengan reformasi struktural pada kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, revitalisasi industri dan pembangunan ekonomi hijau; (3) *spending better* belanja di setiap K/L tahun 2023 yang ditunjukkan dengan efisiensi belanja nonprioritas, belanja yang lebih produktif untuk menghasilkan *multiplier effect* perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan rakyat

### PUSAT KAJIAN ANGGARAN

#### Badan Keahlian DPR RI

**Pengarah :** Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.  
**Penanggung Jawab:** Drs. Helmizar, M. E.  
**Redaktur:** Robby Alexander Sirait · Dwi Resti Pratiwi · Nadya Ahda · Damia Liana · Ervita Luluk Zahara · Syafrizal Syaiful · Achmad Machsuni · Tohap Banjarnahor ·

**Penulis:** Dwi Resti Pratiwi



serta meningkatkan pelayanan umum bagi rakyat; (4) setiap K/L menyajikan data dan informasi reformasi struktural dan reformasi *spending better* yang akan dijalankan tahun 2023 pada RKA K/L RAPBN TA 2023 dengan menunjukkan perbaikan dan perubahannya; dan (5) menjamin tercapainya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program pemerintah pusat dan daerah.

Namun berkaca pada pelaksanaan program yang dijalan Bappenas selama ini, terdapat beberapa hal yang dapat menjadi potensi kendala yang dihadapi Bappenas tiap tahunnya dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsinya tersebut. Potensi kendala tersebut yang perlu menjadi atensi Komisi XI ialah, *pertama*, salah satu target utama Kementerian PPN ialah mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil, namun pada pelaksanaannya belum sepenuhnya berjalan optimal. Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor, di antaranya RPJMN belum sepenuhnya dijadikan acuan dalam penyusunan rencana pembangunan tahunan serta terdapat indikasi tumpang tindih pelaksanaan program/kegiatan antar K/L di pusat dan kurang optimalnya kontribusi kinerja daerah dalam mendukung sasaran pembangunan nasional. *Kedua*, koordinasi dalam rangka upaya sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional belum berjalan optimal. Hal tersebut sejalan dengan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK pada IHPS II tahun 2021 terhadap Rencana Kerja Pemerintah yang telah disusun oleh Kementerian PPN/Bappenas menyimpulkan bahwa perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional tahun 2021 tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, Permen PPN/Bappenas Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional, Permen PPN/Bappenas Nomor 13 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Proyek Prioritas.

Kesimpulan hasil pemeriksaan tersebut didasarkan oleh adanya beberapa permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian, di antaranya sebagai berikut.

1. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) belum sepenuhnya mencakup kegiatan pada Bendahara Umum Negara (BUN).
2. Perencanaan dan penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) belum sepenuhnya memadai

dalam mendukung pencapaian Prioritas Nasional (PN), Program Prioritas (PP), Proyek Prioritas (Pro-P), dan *Major Project* (MP).

3. RKP belum sepenuhnya mencakup Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)/non-KPBU.
4. RKP belum sepenuhnya menjelaskan korelasi PN, PP, KP, dan Pro-P serta MP dikaitkan dengan dukungan alokasi anggaran K/L dalam mewujudkan sasaran, indikator, dan target PN.
5. Terdapat deviasi target, anggaran, lokasi di antara *dataset* Perencanaan KRISNA RKP dengan *dataset* Penganggaran SAKTI Tahun 2021.
6. Keterkaitan pencapaian target antar MP, Pro-P, KP, dan PP serta keterkaitan dukungan *output* K/L terhadap pencapaian target PN.

Dari permasalahan tersebut, maka diharapkan Komisi XI DPR RI dapat mendorong Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas untuk:

1. Berkoordinasi untuk menyusun kajian dalam rangka mengidentifikasi kegiatan di BUN yang dapat diintegrasikan dalam RKP dan menetapkan mekanisme perencanaan dan penganggaran yang mengintegrasikan kegiatan tertentu di BUN ke dalam RKP dan Surat Bersama Pagu Indikatif.
2. Menyempurnakan struktur *database* dalam sistem informasi perencanaan dan menyusun aturan terkait penandaan (*tagging*) DAK yang lebih komprehensif dengan melengkapi *tagging* DAK dan dukungannya terhadap PN, PP, KP, Pro-P, dan MP.
3. Memerintahkan Bappenas agar berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk menyelaraskan peraturan dan kriteria penetapan proyek prioritas pada PSN yang masuk dalam RKP.
4. Mengintegrasikan seluruh data terkait alokasi anggaran untuk mencapai sasaran pembangunan nasional dalam sistem informasi perencanaan, dan menjabarkan keterkaitan anggaran, sasaran, indikator dan target PN, PP, KP, ProP, dan MP dalam mendukung sasaran dan target pembangunan nasional dalam RKP.

MENILIK ASUMSI *LIFTING* MINYAK DAN GAS BUMI TAHUN 2023

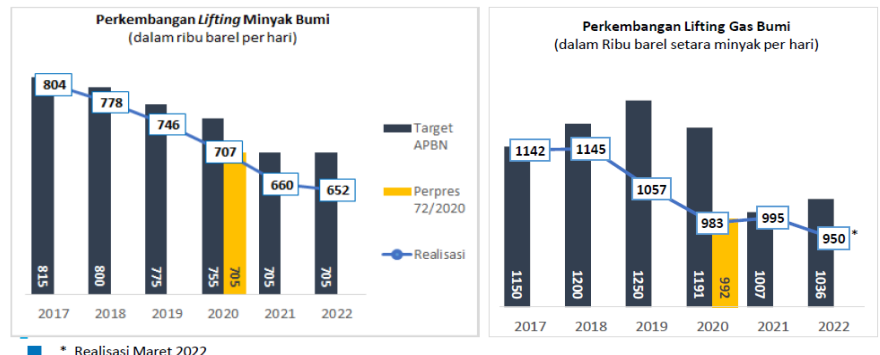
## HIGHLIGHT

- Pemerintah bersama DPR RI telah menetapkan asumsi *lifting* minyak dan gas bumi untuk tahun 2023 sebesar 660 – 680 ribu bph dan 1.050-1.150 bsmph.
- Berkaca pada kinerja *lifting* migas sepanjang tahun 2017-2021, secara umum target *lifting* migas terus mengalami penurunan dan bahkan realisasi *lifting* pun cenderung selalu tidak mencapai target setiap tahunnya.
- Beberapa penyebab yang menjadi kendala rendahnya capaian target *lifting* disebabkan antara lain adanya hambatan dalam produksi, hambatan pada investasi dan pada regulasi serta birokrasi. Rendahnya *lifting* gas bumi pun disebabkan juga oleh rendahnya penyerapan gas domestik yang tidak optimal.
- Oleh karena itu, untuk mencapai target *lifting* migas di tahun 2023 pemerintah perlu mendorong upaya kegiatan peningkatan kegiatan produksi yang dilakukan dengan re-aktivasi sumur-sumur tua dan optimalisasi produksi pada lapangan siap *on stream*; dukungan kebijakan dalam memperbaiki iklim investasi; serta mendorong pembangunan infrastruktur yang lebih efisien dalam mengoptimalkan penyerapan gas di tanah air.

Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah menetapkan asumsi *lifting* minyak dan gas bumi untuk tahun 2023, sebesar 660-680 ribu barel per hari (bph) dan 1.050-1.150 ribu barel setara minyak per hari (bsmph). Penetapan asumsi tersebut didasarkan dengan pertimbangan: a) upaya mendorong tingkat produksi yang lebih tinggi melalui aktivitas pengeboran, kerja ulang, perawatan sumur, serta optimalisasi fasilitas produksi; b) pemanfaatan teknologi produksi seperti *Enhanced Oil Recovery* (EOR) yang terus didorong dalam menahan tingkat penurunan alamiah; serta c) percepatan *plan of development* dan komersialisasi proyek-proyek utama yang diharapkan dapat mengubah cadangan sumber daya yang ada dapat menjadi tambahan produksi *lifting*. Namun, target *lifting* migas di tahun 2023 pun masih mengalami ketidakpastian dalam upaya pencapaiannya. Lebih lanjut, tulisan ini akan mengulas tantangan dalam upaya pencapaian target *lifting* migas tahun 2023.

Kinerja *Lifting* Migas dan Upaya Mencapai Target 2023

Sepanjang tahun 2017–2021, secara umum target *lifting* migas terus mengalami penurunan (Gambar 1). Bahkan upaya untuk mencapai target yang telah ditetapkan pun menjadi sangat sulit setiap tahunnya. Untuk *lifting* minyak, hanya pada tahun 2020 realisasi melebihi target yang ditetapkan. Sedangkan untuk *lifting* gas, realisasi sepanjang tahun 2017-2021 selalu di bawah target yang ditetapkan. Padahal ketersediaan pasokan energi yang tinggi merupakan salah satu aspek dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Gambar 1. Kinerja *Lifting* Minyak dan Gas Bumi

Sumber: Paparan Kementerian Keuangan pada Rapat Panja Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit & Pembiayaan Badan Anggaran DPR RI, 2022.

## PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian DPR RI

Pengarah : Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.  
 Penanggung Jawab : Drs. Helmizar, M.E.  
 Redaktur : Robby Alexander Sirait · Dwi Resti Pratiwi · Nadya Ahda · Damia Liana · Ervita Luluk Zahara

Penulis: Andriani Elizabeth Sinaga



Secara langsung, penurunan *lifting* migas pun berkontribusi terhadap penurunan capaian penerimaan negara di sektor migas. Dengan realisasi tersebut, tidak hanya target *lifting* migas untuk tahun 2023 yang sulit tercapai, namun target 1 juta barel per hari di tahun 2030 yang diproyeksikan pemerintah pun rasanya akan sangat sulit tercapai. Dikhawatirkan pula kinerja *lifting* migas yang terus menurun akan semakin membebani APBN.

Rendahnya kinerja *lifting* migas selama beberapa tahun terakhir disebabkan berbagai kendala yang terjadi, khususnya pada proses produksinya. Sektor hulu migas sampai saat ini masih dihadapkan pada kendala struktural yang membuat kinerja *lifting* migas nasional mengalami tren penurunan. Kendala tersebut khususnya terkait dengan hambatan produksi, investasi dan regulasi serta birokrasi (KEM & PPKF 2023). Pertama, produksi migas sampai saat ini masih banyak tergantung pada lapangan yang sudah tua dengan produktivitas rendah, dimana sebagian besar lapangan *on shore* juga telah memasuki fase *declining* dengan tingkat penurunan alamiah yang cukup tinggi. Kedua, eksplorasi yang dilakukan dalam menemukan lapangan baru membutuhkan investasi yang sangat besar, sedangkan daya saing investasi hulu migas di Indonesia masih relatif rendah, sehingga membatasi penemuan sumber produksi baru. Ketiga, kedua kendala tersebut semakin dipersulit dengan hambatan pada birokrasi dan regulasi. Hal ini salah satunya tercermin pada realisasi pengeboran yang tertahan, disebabkan oleh keterlambatan *final investment decision* (FID) di tahun 2021, permasalahan terkait pembebasan lahan/ penyewaan lahan (KEM & PPKF 2023).

Tidak tercapainya target *lifting* gas pun terkendala dengan realisasi serapan gas domestik yang tidak optimal. Rendahnya

serapan gas khususnya disebabkan oleh distribusi infrastruktur yang belum efisien dan tidak merata. Dengan kondisi tersebut, akses terhadap ketersediaan gas pun menjadi sulit dijangkau baik oleh masyarakat maupun industri nasional. Padahal, serapan gas domestik sepatutnya dapat lebih optimal dengan adanya kebijakan harga gas bumi tertentu sebesar USD6/MMBTU.

### Rekomendasi

Dari pembahasan di atas, terdapat beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian pemerintah untuk mencapai target *lifting* migas di tahun 2023. **Pertama**, pemerintah perlu mendorong sektor hulu migas dalam mengupayakan kegiatan re-aktivasi sumur-sumur tua dan optimalisasi produksi pada beberapa lapangan yang sudah siap *on stream* yang berpotensi menambah *lifting* gas. **Kedua**, upaya peningkatan produksi perlu dilakukan dengan mendorong kegiatan eksplorasi secara masif pada sumber wilayah baru yang memiliki cadangan migas potensial. Hal tersebut didasarkan pada perkiraan cadangan migas Indonesia, sekitar 70 persen berada di wilayah lepas pantai (*off shore*) dan laut dalam (*deep water*) (KEM & PPKF 2023).

Lebih lanjut, upaya tersebut pun perlu disertai dengan dukungan kebijakan dan perbaikan dalam memberikan kemudahan birokrasi untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik. Hal ini dilakukan dalam mendorong dan memperluas kegiatan eksplorasi sumber cadangan migas baru pada wilayah yang potensial, namun sulit terjangkau karena biaya operasi yang sangat besar. Selain itu, untuk mengoptimalkan penyerapan gas nasional pemerintah perlu mendorong pembangunan infrastruktur secara efisien. Dengan demikian, realisasi penyerapan gas nasional akan optimal dan secara beriringan akan memaksimalkan *lifting* gas bumi nasional.



***Budget Issue Brief***  
**Ekonomi & Keuangan**  
**Pusat Kajian Anggaran | Badan Keahlian | Sekretariat Jenderal DPR RI**  
**Telp. 021-5715635, Fax. 021-5715635**

